

PRINSIP DASAR SISTEM EKONOMI ISLAM

Hermanto

Mahasiswa

Pascasarjana IAIN SAS Babel

Bangka, Indonesia

hermantoayahgibran1979@gmail.com

Rahmat Ilyas

Pascasarjana

Pascasarjana IAIN SAS Babel

Bangka, Indonesia

mtd_82@yahoo.com

Abstract

The Islamic economic system is a separate economic system, not a combination and or mixture of capitalist and socialist economic systems. The Islamic economic system places humans not as central (anthropocentrism) but as servants of God (âbid) who must serve and carry out the tasks entrusted to Him as servants (khalifah). For this reason, economic activities must uphold the values of ownership, the values of justice, freedom, balance, and brotherhood and togetherness in accordance with the guidance of religious teachings in order to create a personal and social life and a good state. In the eyes of Islam, economics is not the ultimate goal of human life, but is a completeness in life, a means to achieve higher goals, supports and services for aqidah and the mission it carries.

Keywords: Islamic Economics, Values of Justice, Balance

Abstract

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi tersendiri, bukan merupakan perpaduan dan atau campuran antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam menempatkan manusia bukanlah sebagai sentral (anthropocentrism) tetapi sebagai hamba Tuhan (âbid) yang harus mengabdikan dan mengemban tugas yang dipercayakan-Nya sebagai hamba (khalifah). Untuk itu, dalam kegiatan ekonomi harus menjunjung tinggi nilai-nilai kepemilikan, nilai-nilai keadilan, kebebasan, keseimbangan, dan persaudaraan serta kebersamaan sesuai dengan tuntunan ajaran agama agar tercipta sebuah tatanan hidup pribadi dan bermasyarakat serta bernegara yang baik. Dalam kacamata Islam ekonomi bukanlah tujuan akhir dari kehidupan manusia, tapi merupakan suatu kelengkapan dalam kehidupannya, sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, penunjang dan layanan bagi aqidah serta misi yang diembannya

Pendahuluan

Permasalahan ekonomi yang sering muncul di masyarakat menyangkut tiga masalah pokok yaitu barang/jasa apa yang akan diproduksi (*what*), bagaimana cara memproduksinya (*how*), dan untuk siapa barang/jasa tersebut (*for whom*). Di dalam mengatasi masalah tersebut diperlukan cara tertentu untuk menjalankan perekonomian negara. Cara tersebut dinamakan sistem ekonomi. Yang dimaksud sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Ada berbagai macam sistem ekonomi di dunia ini yang saling berbeda satu sama lain. Timbulnya berbagai macam sistem ekonomi yang berbeda tersebut dalam suatu negara disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah ada tidaknya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, sistem pemerintahan yang dianut suatu negara, kepemilikan negara terhadap faktor-faktor produksi dan sumber daya yang ada dalam suatu negara, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki.¹

Di dunia ada beberapa sistem ekonomi. Secara mudah sebutlah misalnya sistem ekonomi kapitalis, marxis atau sosialis, dan sistem ekonomi islam. Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis sudah lama berkembang, sedangkan sistem ekonomi islam baru dikembangkan tiga dekade terakhir ini. Namun asas-asasnya sudah ada sejak lima belas abad yang lalu, sejak agama islam lahir. Sistem ekonomi islam adalah suatu system ekonomi yang didasarkan pada ajaran nilai-nilai islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu alqur'an, hadist, ijma, dan qiyas. Nilai-nilai sistem

¹ Effendi, Syamsul. "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis." *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)* 6.2 (2019): 147-158.

ekonomi islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna. Karena didasarkan pada nilai-nilai Ilahiah, sistem ekonomi islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi tersendiri, bukan merupakan perpaduan dan atau campuran antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam menempatkan manusia bukanlah sebagai sentral (anthroposentrism) tetapi sebagai hamba Tuhan (âbid) yang harus mengabdikan dan mengemban tugas yang dipercayakan-Nya sebagai hamba (khalifah). Untuk itu, dalam kegiatan ekonomi harus menjunjung tinggi nilai-nilai kepemilikan, nilai-nilai keadilan, kebebasan, keseimbangan, dan persaudaraan serta kebersamaan sesuai dengan tuntunan ajaran agama agar tercipta sebuah tatanan hidup pribadi dan bermasyarakat serta bernegara yang baik.²

Hampir disetiap literatur sejarah pemikiran ekonomi kita selalu dihadapkan kenyataan pahit bahwa umat Islam seakan tidak memberikan kontribusi bagi perkembangan pemikiran ekonomi dunia. Bahkan dalam bukunya Joseph Schumpeter seorang sejarawan dan ekonomi Barat yang cukup ternama, dalam buku karangannya ia tidak menulis pemikiran para tokoh ekonomi muslim pada zamannya. Ia melakukan lompatan jauh dari zaman Yunani menuju zaman St. Thomas Aquinas (1225-1274 M) dalam penulisan bukunya. Dan yang lebih disayangkan lagi hampir semua penulis sejarah ekonomi tidak merekam jejak pemikir ekonomi Muslim dan menyebutnya sebagai masa Dark Age atau Great Gap. Kita tahu bahwa peradaban Islam muncul sekitar abad ke- 6 M hingga akhir masa kejayaannya

² Anwar Abbas, "Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-nilai Dasar, dan Instrumental." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 4.1., 2012. Hal. 1.

Bani Abbasiyah abad ke- 12 M. Pada kurun waktu itu banyak cendekiawan muslim yang mengkaji dan menelorkan karya hampir disegala bidang ilmu pengetahuan tak terkecuali dalam bidang ilmu ekonomi. Meski tidak sedetail urain para pemikir ekonomi abad pertengahan, namun beberapa tokoh ekonomi muslim mengemukakan beberapa gagasan baru tentang praktek ekonomi baik ditinjau dari aktifitas perekonomian pada saat itu hingga analisa teks-teks al Qur'an dan al hadits. Bahkan seorang ekonom sekaligus fuqaha yakni Al Syaibani yang hidup pada tahun 750-804 M telah membuat kitab yang diberinama al khasb (Kerja).³

Sesuai dengan namanya kitab tersebut menguraikan bagaimana pandangan Islam mengenai konsep dari al khasb (kerja). Tidak cukup sampai disitu, sorang fuqaha, sejarawan, dan ekonom muslim Al Maqrizi yang hidup pada tahun 845-1442 M bahkan sudah menemukan teori inflasi. Namun dalam literatur ekonomi modern kita akan lebih mengenal Milton Friedman ketimbang Al Maqrizi dalam perihal teori inflasi. tidak sedikit pula para pemikir ekonomi Islam yang hidup pada masa sebelum abad pertengahan selain dua tokoh tersebut yang mengemukakan teori ekonomi. Meski teori-teori mereka tidak sekompreherensif teori ekonomi modern paling tidak gagasan mereka menjadi landasan bagi teori ekonomi yang ada setelahnya. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan ada karena adanya proses dialektika dari setiap masanya, tak terkecuali dalam ilmu ekonomi.⁴ Dan tidak menutup kemungkinan pula jika dua sistem ekonomi yang ada saat ini (kapitalis dan

³ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 234

⁴ Bahkan Adiwarmarman Karim menyebutkan jika Al Maqrizi dapat disetarakan dengan para pemikir ekonom Barat abad XIX dan abad XX. Dalam teori inflasi yang dikemukakan oleh Al Maqrizi penyebab inflasi dibagi menjadi dua yakni karena faktor alamiah (Natural Inflation) dan kesalahan manusia (Human Error inflation). Sementara ekonom barat menyebutkan penyebab iflasi juga ada dua yakni cost push inflation dan demand-pull inflation. Lihat, Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 395.

sosialis) merupakan hasil pengembangan dari teori-teori ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para cendekiawan muslim.

Ekonomi Islam dibangun berlandaskan doktrin agama Islam, karena ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berabagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dan prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketakwaan kepada tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi, sebaliknya justru membawa seseorang untuk lebih produktif. Kekayaan dapat mendekatkan kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁵

Metode Penelitian

Penelitian ini sepenuhnya adalah riset perpustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang kajiannya dengan menelusuri dan menelaah literatur - literatur dan penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka. Dalam hal ini obyek yang penulis maksudkan adalah buku-buku yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan buku-buku yang mendukung lainnya.

Metode analisis data yang digunakan yaitu metode Content Analysis atau disebut dengan analisis isi, yaitu metode penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang reflektif dan shahih dari data atas dasar

⁵ Rahmat Ilyas, *Konsep mashlahah dalam konsumsi Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 1 No. 1, 2015

konteksnya. Untuk menggunakan metode Content Analysis di perlukan tiga syarat yang dipakai dalam analisis isi yaitu Objektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi. Analisis harus berlandaskan aturan yang dirumuskan secara eksplisit. Untuk memenuhi syarat sistematis, untuk kategorisasi isi harus menggunakan kriteria tertentu. Hasil analisis haruslah menyajikan generalisasi, artinya temuannya haruslah mempunyai sumbangan teoritis, temuan yang hanya deskriptif rendah nilainya.

Pembahasan

1. Prinsip-prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi dalam sudut pandang Islam merupakan bentuk kesinambungan yang adil. Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas pada pendirian Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Kedua pokok pembahasan tersebut dipaparkan dalam neraca keseimbangan yang adil antara dunia dan akhirat, jiwa dan hati, perumpamaan dan kenyataan. Hal ini dapat dilihat dari Al Qur'an Surat Al Qashas ayat 77, yakni:

Artinya: “dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.(Surat Al Qashas ayat 77).

Selain kita dituntut untuk adil (seimbang) antara kehidupan dunia dan akhirat. Dalam konsep sistem ekonomi Islam ada beberapa prinsip dasar yang menjadi pembeda (distinguish) antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Berikut prinsip dasar sistem ekonomi islam.

Pertama, Ekonomi sebagai penunjang aqidah dan aqidah sebagai asas. Di dalam ajaran Islam aqidah merupakan pondasi dasar atas segala sesuatu yang dilakukan seorang muslim di dunia ini. Begitu juga dalam praktik sistem ekonomi Islam, aqidah dijadikan sebagai fondasi utama dalam merealisasikan sistem ini. Dalam kajian sistem ekonomi Islam, semua bentuk kegiatan ekonomi harus diorientasikan untuk menunjang aqidah dan aqidah dijadikan sebagai asas dalam kegiatan perekonomian.

Dalam kacamata Islam ekonomi bukanlah tujuan akhir dari kehidupan manusia, tapi merupakan suatu kelengkapan dalam kehidupannya, sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, penunjang dan layanan bagi aqidah serta misi yang diembannya.⁶ Sementara itu aqidah sebagai asas memiliki arti setiap kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi harus didasarkan pada kaidah-kaidah aqidah Islam. Tidak hanya dalam urusan perekonomian, dalam semua kehidupan manusia harus didasarkan pada aqidah Islam.

Kedua, nilai dasar kepemilikan. Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama dengan konsep kepemilikan dalam faham liberalisme seperti yang dikemukakan John Lock. Bagi John Lock, setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya, dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya.⁷ Ini berarti kepemilikan yang ada pada seseorang adalah bersifat absolut. Oleh karena itu, untuk apa dan bagaimana dia menggunakan hartanya sepenuhnya adalah tergantung kepada dirinya. Ini tidak disetujui oleh Karl Marx. Pandangan tersebut, menurut dia, sangat berbahaya karena akan membawa kepada kehidupan yang eksploitatif dan penuh

⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1997), penerjemah Zainal Arifin, hal. 33

⁷ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000), Cet. V, h. 111-122.

konflik. Untuk itu, agar tercipta suatu kehidupan yang baik (tidak ada konflik antar kelas) kata Marx, kepemilikan individual terutama kepemilikan terhadap alat-alat produksi harus dihapus karena inilah yang menjadi biang dan membuat kaum proletar atau buruh menderita selama ini.⁸

Berbeda dengan dua pandangan di atas, Islam mengakui kepemilikan individual. Bahkan di samping itu, Islam juga mengakui akan adanya kepemilikan oleh masyarakat dan oleh negara. Tetapi kepemilikan tersebut sifatnya tidaklah absolut, tetapi relatif. Apa artinya? Kepemilikan yang ada pada seseorang atau masyarakat atau negara tersebut bukanlah sepenuhnya milik dan hasil usaha mereka, tetapi itu adalah amanat dan kepercayaan dari Tuhan kepada mereka (Q.s. al-Ra'd (13): 28, al-Fajr (89): 16) yang harus dijaga, dipelihara, dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya (Q.s. al-Mâ'idah (5): 7). Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya (Q.s. al-Isrâ' (17): 26-27) dan atau mendinginkan hartanya (Q.s. Muḥammad (47): 38). Karena hal itu akan kehilangan fungsi sosialnya dan akan kehilangan *multiplier effect* dan masalah dari kehadiran hartanya tersebut.

Ketiga, nilai dasar kebebasan. Dalam ekonomi kapitalisme, individu diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan harta yang dimilikinya. Juga untuk masuk atau tidak masuk ke dalam pasar baik sebagai produsen, distributor atau konsumen. Dalam bahasa yang lebih ekstrem tidak ada yang bisa

⁸ Paham komunisme memiliki konsep bahwa kepemilikan individual benar-benar dihapus sama sekali dan diganti dengan kepemilikan oleh negara. Kalau dalam sosialisme, individu masih boleh memiliki kekayaan selain alat-alat produksi penting.

membatasi kebebasan seorang individu kecuali dirinya sendiri. Hal ini tidak dapat diterima oleh paham sosialisme-komunisme. Mereka melihat kebebasan yang seperti itu akan membawa kepada anarkisme. Oleh karena itu, kebebasan tersebut harus ditundukkan untuk kepentingan bersama. Di dalam Islam kebebasan manusia sangat dihormati. Namun, kebebasan tersebut bukanlah tidak ada batasnya. Hal-hal tersebut direstriksi oleh *ahkâm al- Syari'ah* atau hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan agama.⁹ Jika hal itu dilanggar maka menjadi kewajiban bagi negara untuk ikut campur.

Keempat, nilai dasar keadilan. Keadilan yaitu memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan dan mengurangi.¹⁰ Persoalannya sekarang, siapakah yang berkompeten untuk menentukan hal tersebut? Dalam sistem sosialisme dan komunisme, hal itu menjadi otoritas negara, dalam sistem kapitalisme menjadi otoritas individu. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, hal itu menjadi otoritas dan kewenangan Tuhan (Qs. 42; 17). Konsekuensi konsep ini dalam kehidupan tentu akan menimbulkan perbedaan. Misalnya dalam sistem sosialisme-komunisme yang menjadikan kebersamaan dan kesamarataan sebagai nilai utama, maka kebutuhan dijadikan dasar untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak. mereka berpendapat bahwa suatu masyarakat akan dikatakan adil jika kebutuhan semua warganya terpenuhi, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, (dan) papan.¹¹ Jika hal itu tidak terjadi maka

⁹ Adnân Khâlid al-Turkmânî, *al-Madzhab al-Iqtishâdî al-Islâmî*, (Riyâdh: Maktabah al-Sawadi, Jâmi'ah al-Imâm Muḥammad ibn Su'ûd al-Islâmiyyah, t.th), h. 144.

¹⁰ Yusut Qardhawi, *Peran dan Nilai Moral dalam Perekonomian*, (Jakarta: Robbani Press, 1995), h. 390.

¹¹ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000), Cet. V, h. 99.

berarti telah terjadi praktik kezaliman.

Dalam kapitalisme liberal, konsep keadilan tidaklah didasarkan kepada kebutuhan tetapi kepada kebebasan itu sendiri. Menurut konsep ini, adilnya suatu perolehan itu haruslah dibagi menurut usaha-usaha bebas dari individu-individu bersangkutan. Yang tidak berusaha tidak mempunyai hak pula untuk memperoleh sesuatu.¹² Oleh karena itu, di dalam teori keadilan liberalis ini, membantu orang yang miskin atau dalam kesulitan sebagai sesuatu yang sangat tidak etis karena mereka mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan air keringat sendiri.¹³ Sementara dalam Islam keadilan dilihat dari sisi kesesuaian dan ketidaksesuaiannya dengan ajaran agama seperti yang telah digariskan di dalam Alqur'an dan Sunah. Oleh karena itu, kepedulian kepada orang yang miskin dan tertindas dalam Islam akan dilihat sebagai sebuah praktik keadilan karena hal demikian diperintahkan oleh agama (Q.s. al-Tawbah (9): 61). Sementara mengabaikan hal itu merupakan sebuah praktik kezaliman (Q.s. al-Mâ'ûn [107]:1-3).

Kelima, nilai dasar keseimbangan. Sistem ekonomi kapitalisme lebih mementingkan individu dari masyarakat sehingga orang merasakan harga diri dan eksistensinya. Orang diberi kesempatan

¹² K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, h. 100

¹³ Bagi Malthus persoalan ini tidak hanya berdimensi etis tetapi juga berdimensi rasional karena menurut pendapatnya jika orang miskin tadi dibantu dan sudah mulai hidup sejahtera maka libido seksualnya akan tersalurkan. Mereka mempunyai anak yang banyak dan pada titik tertentu, kata Malthus pertumbuhan penduduk kan menurut deret ukur (1,2,4,8,16) dan penambahan produksi makanan menurut deret hitung (1,2,3,4, dst.). Maka, jumlah populasi akan melebihi jumlah persediaan makanan yang ada sehingga masyarakat kembali miskin. Lihat Steven Pressman, dalam bukunya, *Fifty Major Economist*.

untuk mengembangkan segala potensi dan kepribadiannya, akan tetapi pada umumnya, individu tersebut terkenal penyakit egoistis, materialistis, pragmatis, dan rakus untuk memiliki segala sesuatu.¹⁴ Hal itu didorong oleh pandangan dan pola hidupnya yang individualistis dan berorientasi kepada *profit motive*. Sementara sistem sosialis lebih mementingkan masyarakat dari individu. Roh sistem ini sangat berprasangka buruk terhadap individu. Oleh karena itu, pemasangan terhadap naluri ingin memiliki dan menjadi kaya harus dilakukan. Akibat dari kedua sistem ini terjadilah ketegangan, disharmoni, dan ketidakseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Dalam Islam, masalah keseimbangan ini sangat mendapat tekanan dan perhatian. Tidak hanya keseimbangan antara kepentingan orang perorang dengan kepentingan bersama, antara kepentingan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, akal dan rohani, idealisme dan fakta, tetapi juga keseimbangan dalam modal dan aktivitas, produksi dan konsumsi serta sirkulasi kekayaan. Oleh karena itu, Islam melarang dan mencegah terjadinya akumulasi dan sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang, seperti terkandung dalam makna surah al- Hasyr (59): 7) yang artinya supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang- orang kaya saja di antara kamu. Bila terjadi kesenjangan kepemilikan yang tajam antar individu kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, maka berarti telah terjadi praktik kezaliman.

Untuk itu, negara harus turun melakukan intervensi agar

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), Cet. I, h. 84.

keseimbangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat dapat terwujud kembali. Begitu juga dalam hal pembelanjaan dan pengeluaran, Islam mendorong umat kepada ber- perilaku moderat, yaitu tidak *isyrâf* (boros) tetapi juga tidak *bakhîl* (pelit), dalam orientasi pembangunan, kebijakan yang diambil tidak boleh hanya menekankan kepada pertumbuhan (*growth*) tetapi juga kepada pemerataan (*equity*) agar tercipta keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat (*stability*).

Keenam, nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan. Dalam paham sosia- lisme-komunisme, persaudaraan dan kebersamaan merupakan nilai yang utama dan pertama. Untuk itu, agar nilai-nilai tersebut tidak rusak dan tidak terganggu maka kepemilikan individual yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan persengketaan harus dihapuskan dan digantikan oleh negara. Negara yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat sehingga dengan demikian secara teoretis tidak akan ada kesenjangan sosial ekonomi dan permu- suhan. Di dalam paham kapitalisme liberalisme hal ini tidak terlalu menjadi perhatian. Bagi mereka persaudaraan akan dapat terjadi seolah-olah secara otomatis di luar maksud para pelaku ekonomi itu sendiri, karena perekat dari persaudaraan itu bagi mereka adalah kepentingan. Hal ini berbeda dengan ajaran Islam. Kebersamaan dalam Islam merupakan indikator dari keberimanan seseorang (Q.s. al-Hujurât (49): 10).

Nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan ini merupakan konsekuensi logis dari penunjukan manusia sebagai khalifah karena penunjukan tersebut bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja tetapi adalah untuk semua orang (Q.s. al-Baqarah (2): 30). Dengan

demikian, seluruh manusia secara potensial di mata Allah dan memiliki status, kedudukan dan martabat yang sama. Oleh karena itu, perbedaan ras, etnik, dan bahasa bukanlah menjadi variabel pembeda di mata Tuhan. Yang menjadi pembeda bagi Allah adalah keimanan dan ketakwaannya (Q.S. al-Hujurât (49): 13).

Untuk itu, Islam melarang adanya praktik kezaliman dan ketidakadilan terhadap sesama dan adanya praktik-praktik eksploitasi sumber daya alam tertentu oleh seseorang atau kelompok tertentu. Hal tersebut akan merusak nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan yang digariskan Islam. Namun, kebersamaan yang dimaksud di sini juga harus dibingkai dengan kebersamaan etis yaitu suatu kebersamaan dalam kebaikan dan ketaqwaan, tidak dalam melanggar ketentuan-ketentuan agama (Qs. al-Mâ'idah (5): 3). Hal ini secara ekonomis tentu mempunyai makna dan pengaruh yang positif terutama di dalam membangun hubungan kepercayaan (*trust*) dan kesetiaan (*loyalty*) dalam bermuamalah dan akan menghindarkan rasa iri atau persaingan tidak sehat serta permusuhan antara sesama yang akhirnya akan merugikan semua pihak.

Ketujuh, Distribusi Kekayaan dan larangan menumpuk kekayaan. Dalam QS Al Hasyr ayat 7 Allah menjelaskan;

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Secara jelas Allah melarang penimbunan kekayaan pada segelintir orang (kapital) untuk menguasai harta. Dari ayat tersebut menunjukkan kepada kita bahwa harta harus didistribusikan secara merata pada semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim selain harus bersikap bijak harus membuat sebuah regulasi agar tidak hanya segelintir orang yang bisa menikmati harta yang melimpah dan dapat didistribusikan secara merata. Inilah poin penting prinsip dasar dari sistem ekonomi Islam.

Dari prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam yang sudah diuraikan diatas dapat kita ambil kesimpulan jika Islam mengambil sikap moderat atau tengah-tengah (pertengahan) antara iman dan kekuasaan. Model Sistem ekonomi yang moderat seperti ini tidak menganiaya (mendzalimi) masyarakat, terlebih bagi kaum dhu'afa (lemah), sebagaimana yang terjadi pada sistem ekonomi kapitalis. Akan tetapi Islam juga tidak mendzalimi hak kepemilikan pribadi sebagaimana dilakukan oleh paham ekonomi sosialis/komunis, akan tetapi sistem ekonomi Islam berada di tengah-tengah antara keduanya. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, dan Islam juga meminta mereka melaksanakan kewajiban masing-masing. Karena itu Islam menjalankan peranannya dengan penuh keadilan serta kebajikan.

Berdasarkan uraian diatas maka grean desain dari adanya sistem ekonomi Islam memiliki tujuan:

- a. Mencari kesenangan akhirat yang diridhoi Allah SWT, dengan segala kapital yang diberikan kepada makhluk-Nya (Falah).
- b. Dianjurkan memperjuangkan nasib sendiri mencari rizki dan hak milik dengan tidak melupakan hari akhirat, tempat kembali semua

mahluk-Nya.

- c. Berbuat baik kepada masyarakat sebagaimana halnya Allah berbuat baik dengan tanpa hitung-hitungan.
- d. Dilarang membuat kerusakan di muka bumi.

2. Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem kapitalis memandang bahwa manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan. Tidak ada hak orang lain di dalamnya. Ia memiliki hak mutlak untuk membelanjakan sesuai dengan keinginannya. Sosok pribadi dipandang memiliki hak untuk memonopoli sarana-sarana produksi sesuai kekuasaannya. Ia mengalokasikan hartanya hanya pada bidang yang memiliki nilai guna materi (*profit Oriented*). Kapitalisme sebagai sistem ekonomi muncul pada abad ke 16, yang didorong dengan munculnya industri sandang di Inggris. Perkembangan industri sandang di Inggris didukung oleh bahan baku wool yang diproduksi di dalam negeri. Kapitalisme berkembang ketika terjadi revolusi industri di Inggris yang ditandai peralihan dari dominasi modal perdagangan di atas modal bagi industri menuju ke arah dominasi modal industri atas modal perdagangan. Proses terjadi cepat akhirnya muncullah Adam Smith yang dikenal sebagai bapak kapitalisme. Jiwa kapitalisme terlihat jelas pada;

- a. Egoisme, kebebasan menumpuk harta kekayaan, mengembangkan dan membelanjakan, persaingan bebas/*free competition*, kebebasan (

liberalisme/laissez faire)¹⁵.

- b. Mementingkan aktivitas individu.
- c. Harga sebagai penentu/*Price sistim*, harga sebagai penentu. (serba bebas (*laissez faire*)) akan menciptakan keseimbangan baru yang mampu membawa kepada kemakmuran masyarakat. Apabila terjadi kelebihan faktor produksi, maka akan tidak terserap oleh pasar sehingga akan terjadi pengurangan faktor produksi tersebut karena mekanisme pasar dan sebaliknya. Kondisi semacam ini akan dapat memunculkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi,
- d. Pemerintah tidak perlu berperan karena campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi akan menghambat proses pengaturan diri (*self regulation*).¹⁶

3. Sistem Ekonomi Sosialis

Sosialisme berasal dari kata sosial, sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat. Sosialisme adalah suatu doktrin politik yang menekankan pemilikan kolektif dari alat-alat produksi, memberikan suatu peran yang besar pada negara dalam menjalankan perekonomian dengan kepemilikan masyarakat luas atas industri. Sistem ekonomi sosialisme adalah sistem ekonomi dimana ekonomi diatur penuh oleh negara. Dalam sistem ini jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab

¹⁵ Liberalisme adalah suatu paham yang berpendapat dan bercita-cita bahwa manusia dilahirkan di dunia mempunyai hak untuk bebas seperti yang diinginkannya

¹⁶ Effendi, Syamsul. "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis." *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)* 6.2 (2019): 147-158.

negara atau pemerintah pusat. Sistem ekonomi sosialis biasa disebut juga dengan sistem ekonomi yang terpusat. Kenapa disebut dengan terpusat? Karena segala sesuatunya harus diatur oleh negara dan juga dikomandokan dari pusat. Pemerintahlah yang menjadi penguasa dari seluruh kegiatan ekonomi ini. Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menginginkan kemakmuran dari masyarakatnya dan terlaksana merata sehingga tidak ada lagi penindasan ekonomi yang terjadi. Guna mewujudkan kemakmuran yang merata di masyarakat, perekonomian harus diatur oleh pemerintah. Oleh sebab itu, hal tersebut dapat mengakibatkan potensi dan juga daya kreasi masyarakat akan mati sehingga tidak adanya kebebasan dari individu di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi sosialis ini, dasar yang digunakan berasal dari ajaran Karl Marx, dia berpendapat bahwasanya jika kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas hingga dapat menguntungkan bagi semua pihak.¹⁷

Adapun ciri-ciri dari ekonomi sosialis adalah:

1. Kepemilikan harta dikuasai negara
2. Setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi
3. Disiplin politik yang tegas dan keras
4. Tiap warga negara di penuhi kebutuhan pokoknya
5. Proyek pembangunan dilaksanakan Negara

¹⁷ Anisa, Nur. "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis." (2021).

6. Posisi tawar menawar individu terbatas

A. Penutup

Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi tersendiri, bukan merupakan perpaduan dan atau campuran antara sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme, karena falsafah, nilai-nilai dasar, dan nilai-nilai instrumental dari sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan kedua sistem tersebut.

Sistem ekonomi Islam merupakan bangunan sistem ekonomi yang memiliki landasan historis dan filosofis yang kuat. Sementara itu untuk kerangka konseptualnya sistem ekonomi Islam memiliki konsep yang berbeda dengan dua sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Jika kedua sistem tersebut hanya berorientasi pada materialistik, Islam memiliki dua dimensi yakni dimensi materialistik dan dimensi ibadah pada setiap kegiatan ekonomi. Sehingga praktik monopoli, penimbunan, kartel yang sering kali ditemui pada sistem ekonomi kapitalis sangat dilarang dalam praktik ekonomi Islam. Sedangkan dalam hal sosial, orang Islam percaya jika didalam hartanya ada sebagian hak dari orang miskin atau yang lebih membutuhkannya. Oleh karena itu sistem ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai bangunan konseptual yang berdiri sendiri atas dua sistem ekonomi yang ada saat ini.

Daftar Pustaka

- Abbas, Anwar "Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-nilai Dasar, dan Instrumental." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 4.1., 2012.
- Ali Munif, Nasrullah, *Sistem Ekonomi Islam Dialektika antara Thesis, Antitesis dan Plagiat*, An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 2 No.1, 2015.
- Anto, MB. Hendri, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Yogyakarta: Penerbit Eko-nomi, 2003.
- Anisa, Nur. "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis." (2021)
- Effendi, Syamsul. "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis." *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)* 6.2 2019.
- Turkmânî, al-, ‘Adnân Khâlid, *al-Madzhab al-Iqtishâdî al-Islâmî*, Riyâdh: Maktabah al-Sawâdî, Jâmi‘ah al-Imâm Muḥammad ibn Su‘ûd al-Islâmiyyah, t.th..
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UIPress, 1998.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, diterjemahkan Nur Hadi Ihsan dan Rifki Amar, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Ilyas, Rahmat, *Konsep mashlahah dalam konsumsi Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 1 No. 1, 2015
- Islahi, A.A., *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, diterjemahkan oleh Anshari Thayib, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- Qaradhawi, Yusut, *Peran dan Nilai Moral dalam Perekonomian*, Jakarta: RobbaniPress, 1995.

Rachbini, Didik J., *Ekonomi Politik, Paradigma, dan Teori Pilihan Publik*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002.

Saefudin, Ahmad M., *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonom Islam*, Jakarta: Media Dak-wah, 1984.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widia-sarana Indonesia, 1992.

Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islâm, Wazhîfah al-Hukûmah al-Islâmiyyah*, Bayrût: Dâr al-Fikr al-Lubnân, 1992.